



DINSOS
KUTAI TIMUR

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

**2025
2029**
...

   [halo.dinsoskutim](https://www.instagram.com/halo.dinsoskutim)





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan "Rancangan **Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Dinas Dinas Sosial Tahun 2025-2029**" sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan

Dokumen ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah peta jalan transformasi dalam merespon dinamika permasalahan sosial yang kian kompleks, dokumen Renstra **Dinas Sosial** ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan dokumen ini merupakan hasil dari diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan **Dinas Sosial** Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang **Sosial** diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan bidang **Sosial** bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Kami menyadari bahwa gagasan – gagasan ini mustahil terwujud tanpa kalaborasi lintas sektor – Pemerintah, dunia usaha melalui CSR serta komunitas masyarakat. Kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pelayanan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Timur.

Akhir kata semoga langkah – langkah strategis ini membawa mafaat nyata bagi seluruh lintas sektor maupun masyarakat Kabupaten Kutai tim

Pada Tanggal : 29 September 2025
Kepala Dinas,



Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197208052001121007





4.2.	Program Prioritas Dinas Sosial yang mendukung Program Prioritas Daerah
4.3	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja Pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tentang memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah lewat kerangka strategis yang lebih ketat dan terarah. Dokumen ini Memastikan kepatuhan waktu penyusunan perencanaan, Menjamin sinkronisasi antara perencanaan daerah dan nasional, Mengintegrasikan teknologi informasi (SIPD) sebagai instrumen penunjang, Memperkuat akuntabilitas dan komitmen politik kepala daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD yang terkait urusan kesejahteraan sosial Renstra Tahun 2026-2029, ini juga berfungsi sebagai arah dan tolak ukur capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun yang pada pokoknya meliputi visi misi kepala Daerah,

***Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029***



kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,

Berlakunya Peraturan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial kabupaten kutai timur wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Sosial, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsiten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.



Gambar 1.1
Kerangka Renstra



Sumber : Permendagri no. 86, 2017 (inmen)

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis (Revisi Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang nOmor 9 Tahun2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;-
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang standar Pelayanan Minimal) SPM);
- 21 Permendagri No 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 22 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera;
- 23 Keputusan Mendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
- 25 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kutai Timur

1.3.. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026-2029 yaitu :

- 3.1 Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
- 3.2 Mendukung program Bupati Kutai Timur di bidang perencanaan sesuai dengan tugas fungsi Dinas Sosial;

***Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029***



- 3.3 Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur khususnya Urusan Sosial dan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
- 3.4 Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja
- 3.5 Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selaras Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1 | Latar Belakang |
| 1.2 | Landasan Hukum |
| 1.3 | Maksud dan tujuan |
| 1.4 | Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL |
| 2.1 | Tugas Pokok Dinas sosial |
| 2.2 | Sumber Daya Dinas Sosial |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Dinas Sosial |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Sosial |
| 3.2 | Telaahan Rencana Pembangunan Daerah |
| 3.3 | Telaahan Renstra Kementerian Sosial |
| 3.4 | Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis |
| 3.5 | Menentukan Isu – isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| 4.1 | Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial |



BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USURAN
	7.1 IKU
	7.2 IKK
BAB VIII	PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas pokok dengan tata kerja sebagai berikut :

Kepala Dinas :

1. Kepala Dinsos mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinsos menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Dinsos berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah;



- b. Perumusan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian kebijakan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- c. Pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Dinsos untuk keabsahan naskah dinas;
- f. Penjalinan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinsos;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Bidang Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinsos sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat :

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinsos.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,



keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinsos.

3. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinsos;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. Persuratan;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kearsipan
 - d. Administrasi ASN;
 - e. Perlengkapan
 - f. Rumah Tangga ; dan
 - g. Penataan barang milik Daerah
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi;



- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
- c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. penatausahaan Kepegawaian.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinsos.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos.



Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinsos.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi, pengelolaan data pelayanan sosial serta pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial.
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga,
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Daerah provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau lembaga;
 - h. fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos.



Bidang Pemberdayaan sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinsos.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kesetiakawanan, dan restorasi sosial; kepahlawanan, keperintisan,
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos.

Bidang Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinsos.
2. Bidang Penanganan fakir Miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin di Bidang Penanganan Fakir Miskin.



3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanganan fakir Miskin fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penanganan fakir miskin; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinsos.

Kelompok Jabatan Fungsional :

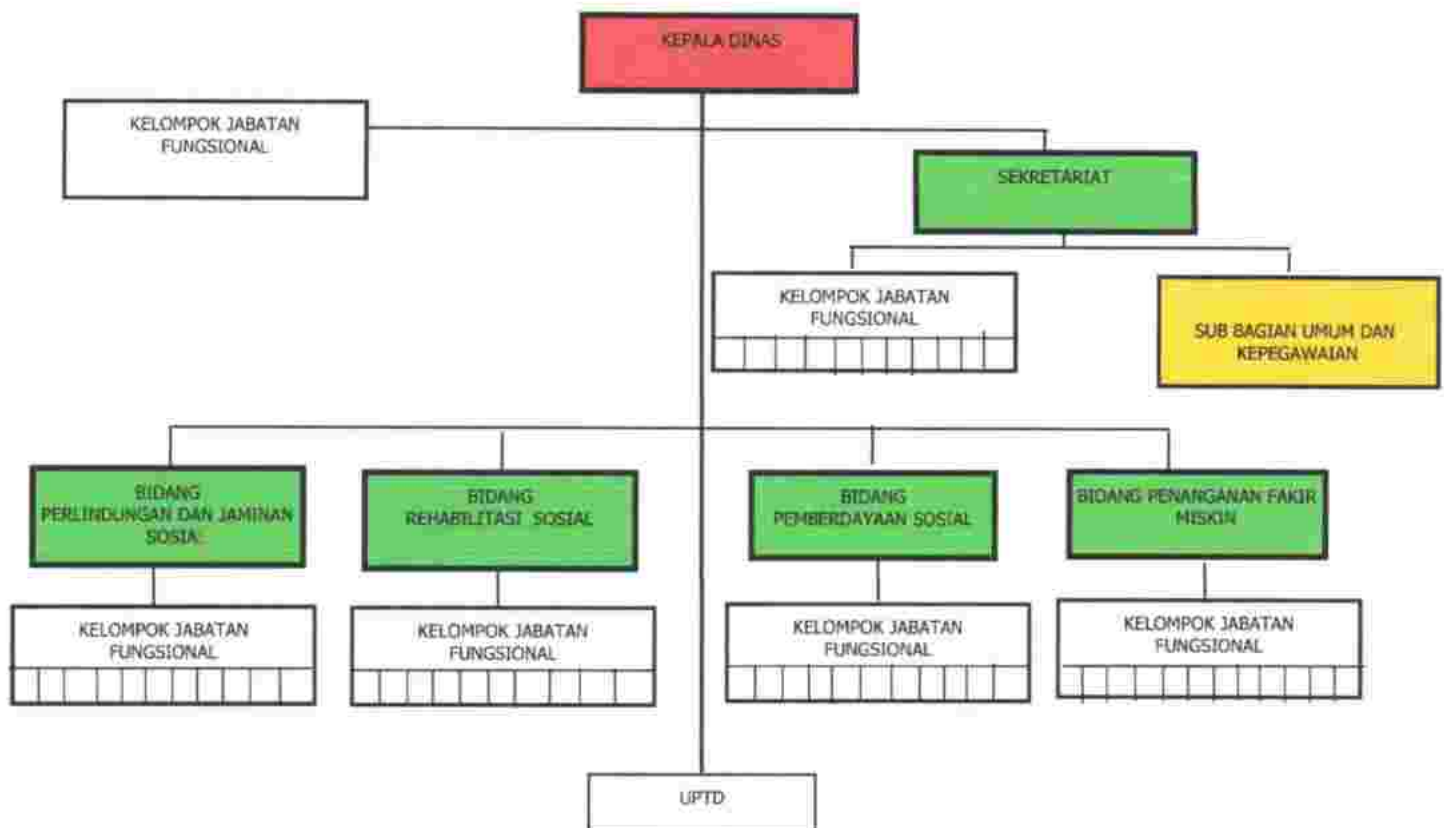
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
4. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
7. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Agar saat melaksanakan tugas dan fungsinya dinas sosial telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur



Sumber Perbup nomor 13,2023

2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebanyak 76 orang, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin



Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten kutai Timur saat ini berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN				JUMLAH
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	S3	2				2
2	S2	1	5			6
3	S1	9	19	7	13	48
4	SMU/SMK SEDERAJAT	4		9	7	20
		16	24	16	20	76

Sumber BKPSDM, 2025

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas sosial Kabupaten kutai timur adalah sebanyak 76 orang berdasarkan komposisi, Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan II	3
2	Golongan III	28
3	Golongan IV	9
4	Golongan V (PPPK)	16
6	Golongan IX (PPPK)	20
JUMLAH		76

Sumber BKPSDM, 2025

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya, pegawai Dinas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang (perlengkapan) yang disajikan dalam tabel 2.2. Dalam operasional kantor, selain SDM yang memadai, sarana dan prasarana kantor

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029**



yang memadai dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kerja
Pada Dinas Sosial Tahun 2025

NO.	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI KURANG BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK BERAT (UNIT)
	KOMPUTER				
1	P.C Unit	58	50	4	4
2	Lap Top	15	15	0	1 dibawa pak hasbi
3	Note Book / Tablet PC	4	4	0	0
4	Hard Disk/ External	3	3	0	0
5	LCD/Infocus	2	2	0	1
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	49	6	0
7	Scanner	12	12	0	0
	ALAT ANGKUTAN				
1	Station Wagon	0	0	0	0
2	kendaraan dinas bermotor	5	3	1	1



NO.	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI KURANG BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK BERAT (UNIT)
	perorangan lainnya (dst)				
3	Sepeda Motor	17	14	3	0
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
1	Global Positional System	1	1	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Mesin Ketik Manual Standard (14- 16 Inchi)	2	2	0	0
2	Mesin Fotocopy Lainnya	2	0	2	0
3	Lemari Kayu	2	2	0	0
4	Filing Cabinet Besi	24	19	2	3
5	Brandkas	2	1	0	1
6	Papan Pengumuman	3	2	1	0
7	Meja 1/2 Biro	32	27	2	3
8	Lemari Es	11	11	0	0



NO.	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI KURANG BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK BERAT (UNIT)
9	A.C. Window	3	3	0	0
10	A.C. Split	27	25	0	2
11	Alat Pendingin Lainnya	3	3	0	0
12	Televisi	8	4	2	2
13	Sound System	1	1	0	0
14	Wireless	5	1	3	1
15	Camera Digital	0	0	0	0
16	Camera Film	0	0	0	0
17	Camera Video	4	4	0	0
18	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0
19	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	5	0	6
20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	0	0	4
21	Meja Kerja Pejabat Lain- lain	3	3	0	0
22	Meja Rapat	1	1	0	0



NO.	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI KURANG BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK BERAT (UNIT)
23	Meja Kerja	10	10	0	0
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	2	0	1
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	3	3	0
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	0	0
27	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1	0	0
28	Kursi Lipat	7	5	2	0
29	Kursi Putar	50	50	5	0
30	Kursi Fiber/Plastik	100	0	34	66
31	Kursi Hadap	0	0	0	0
32	Kursi Rapat	10	10	0	0
33	Sofa	8	5	3	0
34	Vacum	4	3	1	0
35	Rak Besi	35	34	0	1
36	Penghancur Kertas	3	3	0	0



NO.	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI KURANG BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK BERAT (UNIT)
37	Lemari Besi/ Metal	44	29	9	6
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	0	0
2	Camera Conference	0	0	0	0
3	Layar Film/Projector	2	1	0	1

Sumber : BPKAD, 2024

2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Tentang Capaian kinerja Dinas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2020-2025) terdapat dalam delapan indikator kinerja sasaran yang akan dievaluasi kinerjanya selama 5 tahun terakhir. Capaian kinerja indicator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun pernah dilakukan reviu renstra sehingga indicator kinerja berubah sesuai kebutuhan OPD, indikator Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :



Tabel 2.3.

Sasaran dan Indikator kinerja Dinas sosial Kabupaten Kutai Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya kondisi social ekonomi penduduk miskin dan rentan	Persentase Jumlah PMKS yang mendapat layanan Sosial
2	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial
3	Terpenuhinya Tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan

A. Capaian Kinerja Dinas Sosial

Pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021-2025 memiliki beberapa faktor keberhasilan baik dari internal maupun eksternal sehingga dalam penanganan PPKS dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

Faktor Internal :

Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur berjumlah 76 orang, untuk menjalankan peran Dinas sosial selaku pelayanan Kebutuhan Dasar yang menangani 26 PMKS belum mampu untuk menjalankan fungsi dengan baik, karena dari 76 pegawai Peksos hanya 7 orang saja, yang lainnya hasil dari penyetaraan sehingga tidak sesuai dengan disiplin ilmu nya.

Faktor Eksternal :

Dinas Sosial memiliki mitra kerja dari Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, BPBD, BAZ, Polres, Capil, Statistik, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Forum CSR dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Meski secara perhitungan capaian Dinas sosial melebihi dari target yang ditetapkan, masih terdapat hambatan/permasalahan dalam pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:



- 1 Semakin kompleks permasalahan sosial di masyarakat
- 2 Belum optimalnya validitas data kemiskinan.
- 3 Penerima bantuan sosial yang belum tepat sasaran.
- 4 Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam kesejahteraan sosial masih rendah.
- 5 Belum maksimalnya data PPKS
- 6 Warga yang ditangani banyak warga Luar Kutai Timur

Dari hambatan/permasalahan di atas Dinas Sosial berupaya untuk pemecahan masalah diantaranya:

- 1 Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
- 2 Memperkuat koordinasi lintas sektoral agar penanganan PPKS sesuai dengan kebutuhan.
- 3 Memperkuat koordinasi ke kecamatan agar penerima bansos tepat kriteria dan sasaran melalui pendampingan tenaga PKH
- 4 Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial, penyuluh sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar jiwa keberfungsian sosialnya semakin tumbuh.
- 5 Melakukan pendataan 26 PPKS



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke			
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP	Nilai					73,81	75,85	76,29	76,51	C	B+	CC	CC				
2	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	n/a	n/a	n/a	n/a		71,73	71,73	71,73	71,73	71,73	64,00	70,29		0	0,89	0,97	
3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapat Penanganan	n/a	n/a	n/a	n/a		54,53	68,74	68,74	68,74	100	20,00	62,85		1,83	0,29	0,91	
4	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a		61,80	70	75	80	30,11	100	100		0,48	1,42	1,33	
5	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial						66,51	100	100	100	66,79	90,87	85,71		1,00	0,90	0,86	



**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029**



Sumber: Dinas Sosial, 2024

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029**



1. Persentase Jumlah PMKS yang mendapat layanan Sosial
2. Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan

Tabel 2.5

Capaian SPM Dinas Sosial Tahun 2020-2023

No	Jenis pelayanan Dasar	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di di luar Panti	100%	45,22	100%	46,42%	100%	39%	100%	25,42%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di di luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,06%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di di luar Panti	100%	0	100%	0	100%	0	100%	37,67%	100%	100%



4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di di luar Panti	100%	19,10	100%	20%	100%	93.44	100%	96.36%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah korban bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang Rehabosos dan Bidang Linjamsos, 2024

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal. Pada kelompok 4 (empat) sasaran ditahun 2024, secara khusus tercatat semua mutu layanan diterima setiap orang. orang yang menerima layanan penuh termasuk pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, korban bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan terhadap sasaran yang tercatat ganda baik sasaran anak terlantar maupun gelandang pengemis



B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas

Anggaran Dinas Sosial dari Tahun ke 1 – 5 dan realisasi nya pun tahun 1-5 dilihat baik, maupun kurang baik dan menjelaskan penyebab kenapa kurang baik ataupun baik faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja antara ratio dan realisasi dikata buruk maupun baik untuk pengelolaan anggaran atau pendanaan pada Dinas sosial.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kutai Timur menerima alokasi anggaran sebesar Rp. **31.374.177.364,-** yang dialokasikan untuk 6 program 15 kegiatan 74 Sub kegiatan dan sampai dengan 31 Desember 2024 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. **23.659.937.608,-** atau sebesar **75,41%**. Upaya untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran di tahun selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur akan lebih cermat dalam menyusun rencana kerja anggaran dan memaksimalkan sumber daya tersedia. Adapun untuk pencapaian kinerja anggaran dan realisasi pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun atau periode renstra sebelumnya dapat dilihat melalui table di bawah ini:



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,279,057,421	18,973,239,398	16,359,351,365			12,103,149,341	15,715,043,055	14,034,360,092			0.85	0.83	0.86
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250,000,000	333,200,000	1,114,230,000	290,789,990		230,505,220	304,233,348	1,035,463,400	268,114,836		0.92	0.91	0.93	0.92
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	489,451,500	100,000,000	100,000,000	574,114,000	179,530,000	478,085,988	88,166,800	90,052,128	561,779,137	159,593,625	0.98	0.88	0.90	0.98	0.89
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			84,000,000	100,000,000	9,034,000			75,729,230	82,414,128	8,469,000			0.90	0.82	0.94
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			50,000,000	6,514,000				48,369,777	6,201,590				0.97	0.95	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		50,000,000		50,000,000			44,028,820		46,882,218			0.88		0.94	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				65,782,000					52,600,275					0.80	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,000,000	49,200,000	247,820,000	102,225,990		98,409,600	44,600,871	242,958,465	100,052,211		0.98	0.91	0.98	0.98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	70,000,000				45,481,342	42,587,587				0.91	0.61	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,510,480,854	10,082,841,421	11,591,526,995	12,635,830,212		8,119,928,150	8,291,055,570	9,514,314,786	10,492,295,287		0.95	0.82	0.82	0.83



BAB II GAMBARAN UMUM

36

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.773.015,612	7.222.509,746	8.050.584,867	9.336.052,407	12.397.333,212	5.723.240,644	6.876.630,127	6.742.990,061	7.390.302,788	10.255.123,003	0,99	0,95	0,84	0,79	0,83
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.091.124,680	1.075.971,108	1.716.256,554	1.310.624,957		1.038.108,238	1.033.723,269	1.238.939,871	1.194.918,420		0,95	0,96	0,72	0,91	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	289.016,000	162.000,000	172.945,000	694.849,635	238.497,000	267.427,328	161.471,014	168.468,927	684.296,453	233.172,284	0,93	1,00	0,97	0,98	0,98
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100.000.000					99.268.000					0,99	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	50.000.000	113.055,000	50.000.000		10.000.000	48.101,800	111.158.759	48.920.733		1,00	0,96	0,98	0,98	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.000.000	50.000.000				29.497.952	49.343.011				0,98	0,99	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis, Prognosis Realisasi Anggaran				50.000.000					47.205.400					0,95	
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			570.000,000	1.705.744,000	12.000.000			539.317.200	1.604.891.781	9.900.008			0,95	0,94	0,83
Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				600.000.000					532.681.670					0,89	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			570.000,000	1.105.744,000	12.000.000			539.317.200	1.072.210.111	9.900.008			0,95	0,97	0,83
Administrasi Umum Perangkat Daerah		198.000,000	1.408.570,862	2.104.033,400	1.525.156,715		142.210,546	1.230.279,950	1.623.128.460	1.424.766.316		0,72	0,87	0,77	0,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.626.340	15.000.000	712.554,862	937.220.400	619.641,590	47.626.340	15.000,000	712.454.084	716.268.700	568.743.982	1,00	1,00	1,00	0,76	0,92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					142.354,125					111.933.842					0,79
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	33.000.000	78.016.000	400.000.000	249.771,000	49.971.200	33.989,400	74.467.501	346.487.000	248.699.000	1,00	1,00	0,95	0,87	1,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000	140.897,000				63.584.600	140.688.000				0,91	1,00
Fasilitas Kunjungan Tamu															



Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000,00 0	150.000,00 0	618.000,00 0	696.813,000	310.848,00 0	268.825,100	94.221,14 6	443.358,365	496.788,160	316.816,492	0,77	0,63	0,72	0,71	0,96
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					41.645,000					36.885,000					0,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180.849,00 0		510.000,00 0			180.848,900		495.060,000			1,00		0,97
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			180.849,00 0		510.000,00 0			180.848,900		495.060,000			1,00		0,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		190.000,00 0	355.000,00 0	816.632,000	797.353,44 8		182.877,1 60	305.066,840	686.009,885	784.324,584		0,96	0,86	0,84	0,98
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	159.604,28 0	120.000,00 0	180.000,00 0	306.000,000	93.000,000	154.707,880	112.888,0 00	155.480,823	282.723,890	88.805,500	0,97	0,94	0,86	0,92	0,95
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000,000					55.420,000					0,55	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.502,400	70.000,000	175.000,00 0	410.632,000	704.353,44 8	82.253,200	69.989,15 0	149.586,017	347.865,995	695.519,084	0,99	1,00	0,85	0,85	0,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162.000,00 0	1.348.596,1 38	1.641.073,00 0	588.221,00 0		142.541,8 20	1.252.347,53 3	1.251.234,743	559.899,061		0,88	0,93	0,76	0,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		150.000,00 0	446.244,13 8	387.328,000	241.838,00 0	206.076,625	130.541,8 20	364.057,485	341.779,821	217.151,030	0,93	0,87	0,82	0,86	0,90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.219,700	12.000,000	99.500,000	112.000,000	101.930,00 0	56.219,700	12.000,00 0	99.499,841	102.132,800	101.820,000	1,00	1,00	1,00	0,91	1,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.003,130		802.852,00 0	1.031.745,00 0		35.117,130		788.790,207	807.322,122		0,98		0,98	0,78	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000,000	244.453,00 0					240.928,031					0,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			736.734,00 0	3.780.926,96 5	720.805,20 0			679.247,007	2.560.283,851	715.158,015			0,92	0,68	0,99



Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	200,000,000	734,734,000	450,000,000	-	-	188,410,540	-	348,204,950	-	0.94	0.77	-
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	200,000,000	-	150,000,000	-	-	188,410,540	-	129,947,950	-	0.94	0.87	-
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	-	-	300,000,000	-	-	-	-	218,257,000	-	-	0.73	-
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	734,734,000	3,330,926,965	770,805,200	197,433,500	472,701,080	679,247,007	2,212,078,901	715,158,015	0.95	0.92	0.99
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2,370,000,000	-	1,130,926,965	197,433,500	547,354,940	-	-	371,643,700	194,851,715	0.23	0.33	0.99
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	45,999,900	736,734,000	650,000,000	458,877,000	36,960,400	46,394,880	679,247,007	586,005,200	457,947,000	0.74	0.93	1.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	650,000,000	-	-	-	-	548,924,265	-	-	0.84	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelambagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39,552,902,600	450,000,000	900,000,000	64,494,700	38,910,814,838	476,306,200	-	705,505,736	67,359,300	0.98	0.95	0.97
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50,000,000	-	-	-	34,600,500	-	-	-	0.69	-	-	-



PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			24,287,600	150,000,000	7,891,000			19,907,600	53,894,000	-		0.82	0.36	-
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		50,000,000	24,287,600	150,000,000	7,891,000		40,616,000	19,907,600	53,894,000	-	0.81	0.82	0.36	-
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	152,007,447	50,000,000	24,287,600	150,000,000	7,891,000	103,514,447	40,616,000	19,907,600	53,894,000	0.68	0.81	0.82	0.36	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			652,012,400	3,807,500,000	1,247,128,590				1,687,286,655	890,216,610		-	0.44	0.71
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		300,000,000	241,082,400	2,150,000,000	630,605,820		266,006,989	168,408,436	1,027,166,912	433,527,413	0.89	0.70	0.48	0.69
Penyediaan Permukiman		50,000,000	29,750,000	500,000,000	143,816,000		48,100,000	29,735,624	247,420,997	68,779,000	0.96	1.00	0.49	0.48
Penyediaan Sandang				150,000,000	11,511,000				57,048,000	11,450,000			0.38	0.99
Penyediaan Alat Bantu	49,999,800			250,000,000	49,629,850	37,688,680			84,783,961	-	0.75		0.34	-
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				200,000,000	80,644,000				110,135,388	75,986,618			0.55	0.94
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial				200,000,000	32,417,000				97,935,300	30,798,750			0.49	0.95
Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50,000,000	50,000,000		150,000,000	34,101,000	45,703,400	43,930,600		100,610,180	15,520,000	0.91	0.88	0.67	0.46



*Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029*



**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029**



BAB II GAMBARAN UMUM

42

Penanganan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,200,000,000	1,715,098,150	200,000,000	581,898,000		960,078,092	1,610,746,297	186,168,400	519,866,512	0.80	0.94	0.93	0.89
Fasilitasi Bantuan Sosial Keseljahteraan Keluarga	9,516,000,000	834,901,850	510,436,000	86,836,000		1,074,912,040	251,097,948	465,650,307	68,581,554	0.11	0.30	0.91	0.79
PROGRAM PIRANGANAN BEKANA	2,550,000,000	3,124,750,000	2,850,000,000	2,793,905,505		2,347,367,900	1,322,334,469	2,704,344,726	2,478,257,478	0.92	0.42	0.77	0.89
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		2,574,750,000	2,329,939,000	2,793,905,505			808,044,669	1,758,012,358	2,478,257,478		0.31	0.75	0.89
Penyediaan Makanan	2,350,000,000	2,574,750,000	1,527,899,000	1,716,075,470		2,154,134,300	808,044,669	1,034,462,160	1,552,509,798	0.92	0.31	0.68	0.90
Penyediaan Sandang	200,000,000		300,000,000	759,015,600		183,233,600		794,572,500	698,745,000	0.92		0.98	0.92
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			200,000,000	55,164,585				183,876,798	28,704,280			0.92	0.52
Pelayanan Dukungan Psikososial			150,000,000	34,830,000				142,192,900	9,490,000			0.95	0.27
Penyediaan Tempat Pemungutan Pengung- ganan			152,040,000	218,819,850				102,908,000	188,308,400			0.68	0.86
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terpadap Keseljahteraan Bencana Kabupaten/Kota		550,000,000	520,061,000				514,289,800	446,332,368			0.94	0.86	
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		100,000,000	100,000,000				89,717,000	81,412,468				0.90	0.81
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		450,000,000	420,061,000				424,572,800	364,919,900				0.94	0.87



C. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur -Baznas dan Zakat Nasional (Baznas)

Dalam upaya memperkuat sinergi program kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perjanjian ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan kelompok rentan, melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terpadu. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, Dinas Sosial dan BAZNAS berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan kapasitas berbasis zakat dan kearifan lokal.



Sumber : Dinas Sosial, 2023

D. Inovasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur awal mencetuskan untuk membuat Aplikasi WEB dikarenakan BNBA data kemiskinan yang tidak bisa diunduh

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029**

sehingga keinginan Dinas Sosial dengan cara membuat Aplikasi SIPMAS BRO agar hak hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tujuannya agar menghasilkan data kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Timur yang akurat, mutakhir, terintegrasi, mempercepat proses pelayanan Sosial kepada masyarakat agar lebih efektif dan transparan dan memudahkan monitoring, evaluasi, dan pengambilan sampel berbasis data oleh Dinas Sosial dan mendukung pelaksanaan program bantuan sosial tepat sasaran.

Inovasi SIPMAS dikembangkan sebagai basis WEB dan Android dengan 4 fitur sebagai berikut :

- Data Daerah
- DTKS
- P3KE
- PMKS

Gambar
Aplikasi SIPMAS



Sumber : Dinas Sosial, 2025



2.2. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan salah satu pelayanan dasar karena menyelenggarakan urusan wajib dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang krusial bagi masyarakat, seperti rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Pelayanan ini diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan mencakup layanan untuk penyandang disabilitas, anak, lansia, korban bencana, serta penanganan fakir miskin. Maka demikian Dinas Sosial menangani 26 PMKS data tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.8
Data Populasi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosila (PPKS)
Tahun 2020-2024.

No	Jenis PMKS	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	3	4	5	2	
2	Anak Terlantar	57			6	
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	30		21	35	
4	Anak Jalanan			12	2	
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	280	310			
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau di Perilaku Salah	1				
7	Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	4			5	
8	Lanjut Usia Terlantar				81	
9	Penyandang Disabilitas (Fisik)	300	375		1080	
10	Penyandang Disabilitas (Mental)	19			363	
11	Tuna Susila					
12	Gelandangan	40	25		20	
13	Pengemis	60	50		26	
14	Pemulung	20				
15	Kelompok Minoritas					
16	Bekas Warga Binaan Kermasyarakatan (BWBLK)	16				
17	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)				2	
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA				2	
19	Korban Traffking				2	
20	Korban Tindak Kekerasan					



20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial					
21	Korban Bencana Alam				403	
22	Korban Bencana Sosial				2,883	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi					
24	Fakir Miskin	1199 01	1199 01	12306 2		53207
25	Keluarga Bermasalah Psikologis					
26	Komunitas Adat Terpencil	95	99	101	101	101
Jumlah					58,213	

Sumber data Bidang Rehabilitasi sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan 46 emban yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

- 1 Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria:
 - a Berasal dari keluarga fakir miskin
 - b Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
 - c Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
 - d Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga Anak yang tidak pernah
 - e sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
 - f Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
 - g Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
 - h Bila sakit tidak diobati
 - i Yatim, Piatu, Yatim piatu
 - j Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
 - k Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
- 2 Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak



dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

- A Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
 - b Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
 - c Makan makanan pokok tidak mencukupi
 - d Anak ditinggalkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
Apa bila sakit tidak mempunyai akses 47embangun modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
 - e Mengalami eksploitasi
- 3 Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- Kriteria :
- a Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
 - b Anak yang mengikuti proses peradilan
 - c Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
 - d Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
 - e Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
 - f Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
 - g Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana
- 4 Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.



Kriteria :

- c Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
 - b Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
 - c Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalana
Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1
 - d bulan yang lalu
- 5 Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
 - b Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
 - c Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari
- 6 Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria :

- a Anak dalam situasi darurat;
- b Anak korban perdagangan;
- c Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- d Anak korban eksploitasi;
- e Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;



- f Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 49embang, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
 - g Anak yang terinfeksi HIV/
- 7 Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, 49embang maupun 49embang.

Kriteria :

- a Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- b Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- c Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
- d Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- e Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- LUT Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
- LUT Tidak Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

- 8 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, 49embang maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
- b Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- c Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- d Penyandang disabilitas fisik: tubuh, tuna, rungu wicara –
- e Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- f Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda



- 9 Tuna Susila Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan 50emban atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- A Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
Menjajakan diri di tempat umum, di 50emban atau tempat pelacuran
b (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).
- 10 Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum
- a Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
- b Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
- c Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.
- 11 Pengemis 50emban orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- b Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- c Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu



- d Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.
- 12 Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurlang barang-barang bekas.
Kriteria :
 - a Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaurlang barang bekas, dll.
- 13 Kelompok Minoritas Adalah individu kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
 - A tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau ras tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
 - b Mempunyai perilaku menyimpang
- 14 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
 - A Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - b Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
 - c Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan Masyarakat
 - d Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 - e Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- 15 Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
Kriteria :
 - a Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun



b Telah terinfeksi HIV/AIDS

- 16 Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria :

- a Seseorang (laki-laki / perempuan)
- b Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
- c Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang – tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

- 17 Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria :

- a Mengalami tindak kekerasan
- b Mengalami eksploitasi seksual
- c Mengalami penelantaran
- d Mengalami pengusiran (deportasi)
- e Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

- 18 Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :



- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun
 - Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
 - Menjadi pencari nafkah utama keluarga
 - Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
23. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Kriteria:
- Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
 - Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
 - Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
 - Tidak mampu membiayai pengobatan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
 - Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
 - Tinggal di rumah yang tidak layak huni.



- Sulit memperoleh air yang bersih

24 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

- Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
- Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

25 Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

- Kondisi Rumah:
 - a. Luas lantai perkapita
 - b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - c. Tidak mempunyai akses MCK
 - d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - f. Tidak memiliki pembagian ruangan
 - g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - h. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan. Kondisi rusak
- Kondisi lingkungan:
 - a. Lingkungan kumuh dan becek
 - b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar



- c. Jalan setapak tidak teratur
 - Kondisi keluarga:
 - a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)
- 26 Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria:

- Berbentuk komunitas 56embangu kecil, tertutup dan homogen.
- Pranata 56emban bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
- Peralatan dan teknologinya sederhana.
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- Terbatasnya akses pelayanan 56emban ekonomi dan politik.

2.5 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- 1 Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada 56embanguna mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- 2 Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan



layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- 3 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping 57emban yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- 4 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 5 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.
- 6 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kabupaten Kutai Timur
- 7 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- 8 Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
- 9 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga.
- 10 Keluarga Pioner yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.
- 11 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yaitu kelompok yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan di lingkungannya.
- 12 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yaitu yang aktif dalam kegiatan dan menjadi penggerak dalam peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.



- 13 Dunia Usaha yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam program kesejahteraan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 2.9 Jenis – jenis Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
1	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DTKS	MASAYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
2	PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI BPJS	1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 3. Terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi 4. Telah menjadi peserta JKN, tetapi manfaat pelayanan sosial tidak ditanggung 5. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima
	Memfasilitasi untuk mendapatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas Fisik
	Penanganan dengan orang terlantar sasaran (4T)	1. Disabilitas Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Lanjut usia Terlantar 4. Gelandang Pengemis
	Pendampingan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	1. Orang dengan dugaan Tindak Pidana Ringan 2. Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
	Pelayanan Adopsi Anak	Calon Orang Tua Anak (COTA)
	Penyaluran Bantuan YAPI	1. Anak YATIM 2. Anak PIATU 3. Anak YATIM PIATU
	Penyaluran Bantuan Sosial ATENSI	- Klaster Disabilitas - Kluster Lanjut Usia - Kluster Kelompok Rentan - Kluster Anak
	Pelayanan calon klien pelatihan	- Calon Klien PSBR - Calon Klien RSBKW



		- Calon Klien RSBL
	Reunifikasi / Pemulangan PPKS -	- Orang Terlantar - Anak Terlantar - Disabilitas Terlantar
	SURAT REKOMENDASI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	- Masyarakat

Sedangkan jenis-jenis bantuan yang diselenggarakan Dinas Sosial, baik oleh Provinsi yang disediakan data oleh daerah maupun program bantuan dari APBD daerah antara lain:

Tabel 2.10 Jenis-jenis Bantuan Sosial Dinas Sosial Kementerian Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
1	PKH	APBN	Fakir Miskin	1. Fakir Miskin 2. DTKS
2	Sembako	APBN	Fakir Miskin	1. Fakir Miskin 2. DTKS
3	Bantuan Sosial Terencana permakanaan alat bantu	PROVINSI	Lansia dan Disabilitas	1. Fakir Miskin
4	Bantuan Sosial uang	APBN	Yatim Piatu	1. Orang tuan salah satu atau kedua sudah tiada
5	YAPI	APBN		2. Yantim piatu
6	Peserta BPJS	APBD		3. Fakir Miskin
7	Pengiriman peserta PSBR	APBD	Remaja Putus Sekolah	Remaja putus sekolah
8	Pengiriman Lansia Kepanti sosial Provinsi	APBD	Lansia	Lansia Terlantar
9	Bantuan Usaha (UEP)	APBD	Fakir Miskin	Fakir Miskin WRSE
10	Bantuan Sembako	APBD	Fakir Miskin (Miskin Ekstrim)	Fakir Miskin



Dari semua jenis bantuan yang diselenggarakan, tercatat alokasi bantuan yang telah diselenggarakan pada tahun 2021-2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Data Penerima Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KET
			2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Permakanan utk disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan Gepeng	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang dan pengemis	100	100	100	211	APBD	
2	Sandang	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang dan pengemis	90	70	80	126	APBD	
3	Alat Bantu	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang dan pengemis			15	43	APBD	
4	Penyediaan Makanan	Korban Bencana Alam dan Sosial			553	3286	APBD	
5	Sandang	Korban kebakaran			553	609	APBD	
6	Kelompok Rentan	Korban Bencana Alam dan Sosial	20	20	20	20	APBD	
7	Psikososial	Korban Bencana Alam dan Sosial	100	100	100	100	APBD	

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran.

***Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas sosial kabupaten Kutai Timur 2025-2029***



Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial. Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Sosial diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Sosial telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya agar dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan strategis dalam suatu kelaziman untuk melakukan analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial yaitu dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing Masing Bidang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat	Bantuan Kurang tepat sasaran	• Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PMKS sangat tergantung dari Program Bantuan Sosial sehingga PMKS



			belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri • Masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk hidup mandiri • Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Belum tervalidasi secara menyeluruh • Musyawarah Data di level Desa/ Kelurahan belum berjalan dan terjamin dengan baik • Perlunya Regulasi yang mendukung tentang penanganan PMKS di daerah • Belum semua Desa/ Kelurahan melakukan Update Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara Periodik
		Belum Optimalnya data PMKS	• Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional • Sarana dan prasarana dirumah perlindungan



			Sosial belum sesuai Standar • Belum ada Peta Rawan Bencana yang mencakup kebakaran pemukiman • Belum tersedianya data PMKS secara maksimal dan menyeluruh • Kurang optimal Sarana prasana untuk penanganan bencana
		PSKS Perorangan dan Kelembagaan Belum berfungsi optimal	• Kurangnya pelatihan atau sosialisasi kepada PSKS • Pemahaman tugas dan fungsi serta peran PSKS masih rendah • Rendahnya jiwa Sosial PSKS

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Sosial dapat dirincikan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial dan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

❖ **Kekuatan (Strenght)**

- a Adanya kerjasama dengan OPD : Capil, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan,



BPBD, Statistik, Pemberdayaan Perempuan dan Puskesmas dan Satpol PP

- b Tersedianya PSKS di setiap Desa dan Kecamatan
- c Adanya penggunaan teknologi informasi
- d Regulasi tentang PPKS dan PSKS

❖ Kelemahan (weakness)

- a Perda atau perbup belum mencakup seluruh aspek PPKS, sehingga mengalami kesulitan meski tidak terlalu signifikan, tetap saja ada kendala mengingat permasalahan sosial cukup kompleks
- b Menurunnya rasa solidaritas masyarakat di kehidupan sosial, selain empati dan solidaritas
- c Kuantitas, kualitas kompetensi kapasitas SDM belum memadai dalam penanganan PPKS
- d Kurang dukungan dari masyarakat

❖ Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi sebagai berikut

- a Kebijakan Nasional terkait Sosial yang selalu berubah-ubah
- b Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin meningkat.
- c Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur khususnya Kutai Timur sebagai Daerah Serambi Ibu Kota Negara (IKN) dan Indonesia umumnya.
- d Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah sosial di level internasional nasional, provinsi dengan level Kabupaten/Kota yang ada
- e Belum sinkronnya data kemiskinan antar lembaga.
- f Banyaknya masyarakat yang hidupnya ketergantungan dengan bantuan sosial
- g Kemajuan teknologi yang dapat menggeser nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat.
- h Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat)



- i Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pembangunan.
- j Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam pengembangan terhadap ekonomi masyarakat.
- k Rendahnya kepedulian PSKS untuk kesejahteraan Sosial

❖ Peluang

Sedangkan Peluang bagi Dinas Sosial dan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara.
- b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.
- c Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- d Adanya kebijakan nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan kesejahteraan sosial.
- e Otonomi daerah disertai perimbangan kewenangan dan keuangan.
- f Adanya konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang cacat.
- i Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Kesejahteraan Sosial.
- j Adanya sekolah rakyat untuk memberikan akses pendidikan Gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin.
- J Sinergitas program dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2025-
- k 2029.
- l Tingginya komitmen Kepala Daerah dalam pelayanan Sosial



- m Keunggulan Kabupaten Kutai Timur sebagai penghasil tambang, serta rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpeluang terjadiya pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA. Budaya dan kelembagaan masyarakat mendukung partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- n Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.
- o Banyaknya inovasi dari stakeholder terkait Teknologi Tepat Guna.

2.6. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses kembang isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang.

Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan Pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.



Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada di Dinas Sosial Kabupaten kutai Timur Adalah sebagai berikut :



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sektor Pertambangan Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor Perikanan Sektor Industri Pengolahan	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dan cenderung terjadi ketidakmerataan antar wilayah	Pengembangan Kualitas SDM Pelestarian Budaya	<i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (<i>Millenium Development Goals</i>)	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penangan Stunting <i>Middle Income Trapp (MIT)</i>	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat Ketahanan Pangan Dampak Pembangunan IKN				Tingginya angka kemiskinan
	Transformasi ekonomi yang berjalan lambat dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi industri	Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Implementasi dari kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru Kebijakan pengembangan industri pengolahan Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Percepatan Transformasi Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Ketergantungan Barang Pokok Nusantara di Kalimantan Timur	Optimalisasi Sumber Daya Daerah Non-Tambang
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola	Peningkatan pelayanan Publik dan Kompetensi ASN		Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan		upaya efisiensi anggaran	yang profesional dan akuntabel	
	Belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar dan digital yang berkualitas	Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Perkembangan dan disrupsi teknologi		Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	Infrastruktur dasar yang berkelanjutan Pemekaran wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada tingginya risiko bencana	Kelestarian kawasan lindung dan keanekaragaman hayati kerawanan bencana dan dampak perubahan iklim kerusakan dan pencemaran lingkungan pengelolaan sampah dan limbah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan	Komitmen penurunan emisi GRK dan tantangan perubahan iklim serta transisi <i>energy ke clean energy</i>		Peningkatan kualitas lingkungan hidup pelestarian lingkungan sumber energi nasional	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Kutai Timur

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial merumuskan berbagai macam kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan berbagai elemen stakeholder untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan dan tantangan di masyarakat.

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran strategis Adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Sosial sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Kutai Timur Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kutai Timur. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

"Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing"

Visi tersebut merupakan suatu cita-cita besar dalam rangka membangun daerah dan masyarakat Kutai Timur agar dapat berkembang secara berkelanjutan, menghadapi tantangan zaman, dengan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Unsur yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan adalah Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Secara lebih spesifik.



Sedangkan Visi Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

- MISI I** Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.
- MISI II** Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan
- MISI III** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas
- MISI IV** Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas
- MISI V** Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Tujuan Renstra Dinas Sosial 2025-2029 memperhatikan sasaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan NSPK. Sasaran dari Dinas Sosial berbentuk kondisi ideal dari suatu ruang lingkup pada 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

“ 1. Meningkatnya kesejahteraan sosial Rumah tangga miskin dan Rentan 2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial “ yang menjadi kewenangan dari Dinas Sosial. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, perlu adanya sebuah Langkah konkrit dan terukur untuk menjadi landasan dari usaha mencapai tujuan yang disebut dengan sasaran. Adapun Indikator sasaran Dinas Sosial sebagai berikut :



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Target					Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Penduduk Miskin dan Rentan	Indikator Kesejahteraan Sosial (IKesos)	%	47,41	49,91	52,41	54,91	57,41	60,00
2		Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani	%	11,11	14,10	17,09	20,08	23,08	26,00

Dari makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja yang diharapkan menjadi gambaran desain keseluruhan kinerja Dinas Sosial yang dapat terukur dan dilaksanakan seluruh bidang teknis pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Desain pohon kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Secara terperinci tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur K untuk periode 2025-2029 dapat digambarkan dalam diagram Pohon Kinerja sebagai berikut

POHON KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN
2025-2029

Kepala Daerah

Es II

Es III

Jatung Abil Muda dan
Abil Pertama

Kinerja Sasaran
Daerah

Kinerja Unsuran OPD

Program

Kegiatan

Meningkatnya Penanganan Pemenuh Pelayanan
Kesegjahteraan Sosial (PPKS)

Meningkatnya Penanganan Pemenuh Pelayanan
Kesegjahteraan Sosial (PPKS)

Pengertian Kemiskinan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
INDIKATOR
Persentase PSKS yang aktif dalam
Penyenggaraan Sosial

Meningkatnya penyenggaraan Pemberdayaan KAT
1. Terpenuhinya pada KAT yang Memiliki Kapasitasnya Kewenangan Kabkota
2. Terpenuhinya keluarga pada KAT yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan
3. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
4. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
5. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
6. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
7. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
8. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
9. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
10. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
11. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
12. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
13. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
14. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
15. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial

Meningkatnya penyenggaraan Pemberdayaan KAT
1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinergisasi Penyelenggaraan
Lain dan Gratis bebandan pengumpulan uang atau barang

Meningkatnya Penanganan Poksi Sumber Kesegjahteraan
Sosial dan Kewenangan Kabkota
1. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
2. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
3. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
4. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
5. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
6. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
7. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
8. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
9. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
10. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
11. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
12. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
13. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
14. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota
15. Meningkatkan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabkota

**PROGRAM PEMUNGKAPAN WARGA NEGA-
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**
INDIKATOR
1. Persentase Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan

Terlaksananya Pemungkapan Warga negara
Migran dan Tindak Kekerasan di daerah Prov
untuk diupayakan ke desa/kelurahan asal
Kewenangan Kabkota
1. Terpenuhinya pada KAT yang Memiliki Kapasitasnya Kewenangan Kabkota
2. Terpenuhinya keluarga pada KAT yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan
3. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
4. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
5. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
6. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
7. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
8. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
9. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
10. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
11. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
12. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
13. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
14. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial
15. Terpenuhinya KAT yang terdampak bencana alam dan bencana sosial

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
INDIKATOR
Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi
Sosial

Meningkatnya Rehabilitasi dasar Penyandang
Disabilitas terlar, Anak terlar, Lanjut usia
terlar dan gelandang Pengemis
1. Terpenuhinya kebutuhan pemakanan per orang
sebulan dengan standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabkota
2. Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya
untuk kebutuhan sehari-hari Kewenangan Kabkota
3. Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu
dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan
Kabkota
4. Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi keluarga kewenangan Kabkota
5. Terlaksananya pemberian bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabkota
6. Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan
Kewenangan Kabkota
7. Terpenuhinya orang yang mendapatkan akses ke
layanan pendidikan dan kesehatan dasar
Kewenangan Kabkota
8. Terlaksananya pemberian layanan data dan
informasi Kewenangan Kabkota
9. Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan
Kewenangan Kabkota
10. Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan
penelusuran keluarga kewenangan kab
kota
11. Terlaksananya pemberian layanan rujukan
Kewenangan Kabkota

Meningkatnya Rehabilitasi dasar Penyandang Disabilitas terlar, Anak terlar, Lanjut usia
terlar dan gelandang Pengemis
1. Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabkota
2. Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabkota
3. Terpenuhinya kebutuhan pemakanan per orang sesuai dengan standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabkota
4. Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 bulan Kewenangan Kabkota
5. Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan
Kewenangan Kabkota
6. Terpenuhinya orang yang mendapatkan kebutuhan perbaikan kesehatan di luar panti
Kewenangan Kabkota
7. Terlaksananya pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan kab / kota
8. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah
Kesegjahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bulan Korparat HIV/AIDS dan NPPZA kewenangan Kab
kota masyarakat kewenangan Kabkota
9. Terlaksananya Pemberian Bimbingan dan Penunahan Nomor induk Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Jatah Identitas Anak bagi Penyandang Masalah
Kesegjahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS Kewenangan Kabkota
10. Terpenuhinya orang yang mendapatkan Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar
Kewenangan Kabkota
11. Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan kab/
kota
12. Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan Rujukan Keluarga Kewenangan Kab/
kota
13. Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabkota
14. Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabkota
15. Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemenuh pelayanan
Kesegjahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabkota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
INDIKATOR
1. Cakupan Anak - Anak terlar yang di Tangani
2. Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkan Palihan
Untuk Pengembangan Usaha

Terdapatnya Pemeliharaan Anak - Anak terlar
1. Terlaksananya Pendidikan Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabkota
2. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan
Kabkota
3. Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang
mendapatkan Bantuan Pengembangan Usaha
Kewenangan Kabkota
4. Terlaksananya Pengolahan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabkota
5. Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang
mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Kewenangan Kabkota
6. Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal
usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin

Terlaksananya Penyaluran data Kemiskinan Detail 1-2
Daerah Kabkota
1. Terlaksananya Pendidikan Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabkota
2. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan
Kabkota
3. Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang
mendapatkan Bantuan Pengembangan Usaha
Kewenangan Kabkota
4. Terlaksananya Pengolahan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabkota
5. Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang
mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Kewenangan Kabkota
6. Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal
usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin
Kabkota

PROGRAM PENANGANAN BENCANA
INDIKATOR
Proses
Korban bencana Alam, Sosial dan Non Alam
yang terlar, kebutuhan dasar pada
saat dan setelah tanggap darurat bencana
Kabupaten/kota

Terlaksananya Perlindungan Korban Bencana Alam dan
Sosial
1. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan Kabkota
2. Terpenuhinya
Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan
Lainnya yang Bersedia (Pengungsian) dan
pada Masa Tangap Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana Kewenangan
Kabkota
3. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Kewenangan Kabkota
4. Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial
bagi Korban Bencana Kewenangan Kabkota
5. Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan
Kabkota

Terselenggaranya Pemberdayaan masyarakat Terhadap
Kesegjahteraan Bencana Kabkota
1. Terlaksananya Kegiatan yang Melibatkan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan
Siaga Bencana Kewenangan Kabkota
2. Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun
Siaga Bencana Kewenangan Kabkota
3. Tersedianya Rencanan Turun Siaga Bencana
4. Input Mudi yang Mengingat Kapasitasnya
Kewenangan Kabkota
5. Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan dalam penanganan bencana sosial dan
non Alam
6. Meningkatkan Kapasitas Siaga Bencana dan
Lambung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan
bencana
7. Meningkatkan Kapasitas Bantuan Lapangan Bencana
Ulang Tani bagi Korban Bencana
8. Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi
pengembangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
9. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kewenangan
Sosial (KS) dan Keaktifan lokal (KL)
10. Terlaksananya fasilitasi penemuan rawan konflik
sosial
11. Tersedianya sosial untuk sosialisasi, komunikasi
informasi, dan edukasi
(KIE) kepada masyarakat terkait penanganan



Lebih lengkapnya tujuan, sasaran dan indikator dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2025-2029
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran			Tingkat Kemiskinan		7,93- 8,14	7,16 – 7,55	6,38 – 6,97	5,61 – 6,38	4,83- 5,80	4,06- 5,21	
	Pengentasan Kemiskinan		Indikator Kesejahteraan Sosial (IKesos)	$IKESOS_{Kabupaten/Kota} \times 100$	47,41	49,91	52,41	54,91	57,41	60,00	
		Meningkatnya peranganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan}}{\text{Seluruh PPKS yang terdata}} \times 100$	11,11	14,10	17,09	20,08	23,06	26,00	



Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Timur

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya peranangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terlayani	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan}}{\text{Seluruh PPKS yang terdata}} \times 100$	11.11	14.10	17.09	20.08	23.06	26.00
Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan berintegritas demi terwujudnya Pelayanan Dinas Sosial yang Transparasi	Nilai SAKIP	Indeks	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{PK} \times 30\%) + (\text{UK} \times 25\%) + (\text{LK} \times 15\%) + (\text{EK} \times 10\%) + (\text{CK} \times 20\%)$	47,00	47,60	48,00	48,50	49,50	50,00
		IP ASN	Indeks	$\text{IP ASN} = (\text{Kualifikasi} \times 30\%) + (\text{Kompetensi} \times 30\%) + (\text{Kinerja} \times 40\%)$	80	80	80	80	80	80



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2030
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Sosial}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100\%$	54,74	65,69	71,16	85,76	91,24
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya penyelenggaraan pemberdayaan KAT	Jumlah keluarga KAT diberi pembinaan dan Pemberdayaan	keluarga	Jumlah keluarga KAT diberi pembinaan dan Pemberdayaan	101	101	101	101	101
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Meningkatnya Kapasitas KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	101	101	101	101	101
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Terperluhinya Keluarga KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	101	101	101	101	101



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelenggaraan pengumpulan sumbangan daerah kab/kota	Jumlah dokumen pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah dokumen pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
n Uang atau Barang	Pengumpulan Uang atau Barang									
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan PSKS daerah kabupaten / kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan kemampuan nya	Jumlah	Jumlah PSKS yang dikembangkan Kemampuan nya	179	270	270	270	270	270
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	50
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	83	83	83	83	83	83



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	500	500	500	500	500	500
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan	orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan	282 orang dan 1 lem baga	282 orang dan 1 lem baga	282 orang dan 1 lem baga	282 orang dan 1 lem baga	282 orang dan 1 lem baga	282 orang dan 1 lem baga



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi						
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	182	182	182	182	182	182



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA A PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terwujudnya penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN	%	$\frac{\text{Jumlah warga migran yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh migran yang melapor}} \times 100\%$	50	60	70	80	90	100
'Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Terlaksanannya pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	'Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah	'Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5	5	5	5	5	5



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	5	6	7	8	9	0
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	PROSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL	Prosentase	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100\%$	9,80	10,78	11,76	12,74	13,72	14,70



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	jumlah	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	250	250	250	250	250
Penyediaan Perumahan	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120	120	120	120	120	120



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	40	40	40	40
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14	30	30	14	14	14
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30	30



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kabupaten/Kota								
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, dan Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	100	50	50	50	50
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terselenggaranya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	50	110	90	100	200



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	20	20	20	20
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	20	20	20	20
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	25	25	25	25



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	20	20	50	80
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	20	20	30	35
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Terpenuhinya Orang yang Membuat Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	20	20	20	20



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi a Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	'Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	orang	'Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	369	369	369	369	369	369
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	108	108	108	108	108	108



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	108	108	108	108	108	108
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30	30
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakai dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun	Jumlah orang yang Menerima pakai dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah orang yang Menerima pakai dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	108 orang	108 orang	108 orang	108 orang	108 orang	108 orang



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	23	23	23	23	23	23
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	25	25	25	25
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	orang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	125	125	125	125	125	125



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota						
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota								
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	10
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat	CAKUPAN ANAK - ANAK TERLANTAR YANG DITANGANI	persentase	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat perlindungan _____ Jumlah seluruh anak terlantar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		'Cakupan fakir miskin yang mendapatkan pelatihan untuk pengembangan usaha	persentase	Jumlah fakir miskin yang mendapat pelatihan pengembangan usaha _____ Jumlah fakir miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terwujudnya pemeliharaan anak-anak terlantar (cota)	'jumlah anak - anak terlantar yang dipelihara	orang	'jumlah anak - anak terlantar yang dipelihara	15	10	10	10	10	10
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15	10	10	10	10	10
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	10
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	15	8	8	8	8	8



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA A PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	orang	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	10	10	10	10	10	10
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya verifikasi data dan validasi data kemiskinan desil 1-5	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terkelola	orang	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terkelola	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Fasilitasi Bantuan Pengembang	Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	50	20	55	56	56



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Ekonomi Masyarakat	Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	20 orang	35 orang	85 orang	85 orang	85 orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	orang	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	500 orang	550 orang	600 orang	650 orang	700 orang	



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Terselenggara bantuan untuk korban bencana	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL	persentase	$\frac{\text{Jumlah korban yang mendapat pelayanan sosial}}{\text{Jumlah total korban bencana}} \times 100\%$	50	60	70	80	90	100
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota	Terselenggara perlindungan korban bencana alam dan sosial	Prosentase Korban bencana Alam, Sosial dan Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/kota	orang	Jumlah Korban bencana Alam, Sosial dan Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/kota	16,67	23,33	30,43	56,12	60,85	67,61
Penyediaan Makanan	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 jiwa	10.000 jiwa	10.000 jiwa	10.000 jiwa	10.000 jiwa	10.000 jiwa



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kabupaten/Kota								
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1050	500	150	500	550	400
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	300	50	50	100	300



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kabupaten/Kota								
Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	120	120	120	120	120
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20	100	100	100	100	100
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi kesiapsiagaan bencana	orang	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi kesiapsiagaan bencana		300	300	300	300	300



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terselenggara nya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terselenggara nya Sosialisasi dan pelaksanaan taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45	45	45	45	45	45
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terfasilitasi bantuan Langsung berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	orang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	250	250	250	250	250	250
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terselenggara nya Sosialisasi dan edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	300	300	300	300	300	300



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	pada anak Usia sekolah Terselenggara Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat terkait Penanggulangan an Bencana pada Masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	200	200	200	200	200	200
Peningkatan Kopetensi Taruna Siaga Bencana dalam Penanganan bencana	Terselenggara Peningkatan Kopetensi Taruna Siaga Bencana dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang mendapat Peningkatan Kopetensi	orang	Jumlah Tagana yang mendapat Peningkatan Kopetensi	50	50	50	50	50	50



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Koordinasi, Efisiensi dan Efektivitas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{PK} \times 30\%) + (\text{UK} \times 25\%) + (\text{LK} \times 15\%) + (\text{EK} \times 10\%) + (\text{CK} \times 20\%)$	55,00	59,60	75,00	79,50	80,50	89,00
		IP ASN	Indeks	$\text{IP ASN} = (\text{Kualifikasi} \times 30\%) + (\text{Kompetensi} \times 30\%) + (\text{Kinerja} \times 40\%)$	81,00	81,05	81,10	81,15	81,20	81,25
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok ume n	2 dok ume n	2 dok ume n	2 dok ume n	2 dok ume n
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Administrasi dan Pelayanan Keuangan	Jumlah Dokumen/laporan keuangan yang dihasilkan (audited)	Dokumen	Jumlah Dokumen/laporan keuangan yang dihasilkan (audited)	6 Lapo ran	6 Lapo ran	6 Lapo ran	6 Lapo ran	6 Lapo ran
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Ora ng	76 Ora ng	76 Ora ng	76 Ora ng	76 Ora ng
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dok ume n	17 dok ume n	17 dok ume n	17 dok ume n	17 dok ume n



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	17 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ASN	Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 paket	1 paket	-	1 paket	-
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan kepegawaian	dok	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan kepegawaian		5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	paket	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	10 paket	10 paket	74 paket	74 paket	10 paket
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Jenis Administrasi Umum Yang dilaksanakan	Jenis	Jumlah Jenis Administrasi Umum Yang dilaksanakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
Penyediaan Peralatan dan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	12 Paket	12 paket	12 Paket	12 Paket	12 paket



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor									
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya paket peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	paket	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	5 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	unit	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2030
Penyediaan Bahan Logistik Kantor/Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	18	30	20	50
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Keuangan	dok	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Keuangan	50 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	Unit	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 unit



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA A PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2030
Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 unit	1 unit	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 unit	1 unit	-	-



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2030
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 unit	1 unit	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Penunjang	laporan	Jumlah laporan Jasa Penunjang	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik	Jumlah Jenis Barang milik daerah yang di pelihara	Unit	Jumlah Jenis Barang milik daerah yang di pelihara	264 jenis	277 jenis	277 jenis	277 jenis	277 jenis	277 jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit
Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	241 Unit	254 unit	254 unit	254 unit	254 unit	254 unit



menentukan tahapan dan prioritas Pembangunan Lima Tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten
 Kutai Timur**

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Fokus pada program pengentasan kemiskinan, melalui pemberian bantuan sosial, subsidi untuk kelompok rentan, dan peningkatan insentif bagi pekerja sektor informal.	Meningkatkan kualitas data kemiskinan	Verifikasi dan validasi data kemiskinan
		Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	Pemberian bantuan UEP dan KUBE mulai desil I dan 5
		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jaminan Kesehatan (BPJS) dan bantuan untuk Masyarakat yang berdampak bencana
		Penguatan jejaringan PSKS	Memberikan pelatihan pengembangan Kapasitas PSKS

Sumber Data : RPJMD Kab. Kutai Timur



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara terperinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(034)	(035)	(036)	(037)	(038)	(039)	(040)	(041)	(042)	(043)	(044)	(045)			
Jumlah idiom/kegiatan/kegiatan yang dihabiskan	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumen)	1		B.125.091.183.00	0	B.420.020.100.00	0	B.104.322.120.00	0	0.487.020.100.00	0	0.050.044.213.00					
	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumen)	45	70	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004					
	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumen)	12	13	54	54	54	54	54	54	54	54	54					
	Jumlah Laporan/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumen)	16	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17					
	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan (Dokumentasi)	39	161	859	909	909	909	909	909	909	909	909					
	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)	1	0	0													
	Jumlah Laporan/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan (Dokumentasi)																
	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)																
	Jumlah Laporan/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)																
T.06.01.2.02.0001 - Penyelenggaraan Tgl dan Terpenting ASN				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		KAB. KUTJA TAHUN	
Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan (Dokumentasi)	30	161	959	959	959	959	959	959	959	959	959		0.00			
T.06.01.2.02.0002 - Penyelenggaraan Administrasi Publikasi dan Tgl ASN				2.068.107.643.00		0.120.020.100.00		0.603.211.304.00		0.577.020.100.00		0.606.044.213.00		0.00		KAB. KUTJA TAHUN	
Terdapatnya Administrasi Publikasi dan Tgl ASN	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)	45	70	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004		0.00			
T.06.01.2.02.0003 - Penyelenggaraan Administrasi dan Tgl ASN				250.000.000.00		250.000.000.00		250.000.000.00		250.000.000.00		250.000.000.00		250.000.000.00		KAB. KUTJA TAHUN	
Terdapatnya Administrasi dan Tgl ASN	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)	12	13	54	54	54	54	54	54	54	54	54		250.000.000.00			
Tidak tercapainya Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan/Keputusan/Keputusan SMDP (Dokumentasi)	Jumlah Dokumen/Keputusan dan Pelaksanaan Anggaran SMDP (Dokumentasi)	12	13	54	54	54	54	54	54	54	54	54		250.000.000.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKATEGORI OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU					
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)				(13)
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD	Aspek Dokumen																KAB. KUTNA TIMUR	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		(16)
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	KAB. KUTNA TIMUR	(17)
Terlaksanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		(18)
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan Timbal-balik Zonasi dan SKPD																	KAB. KUTNA TIMUR	(19)
Terlaksanya Laporan Keuangan Bulanan Timbal-balik Zonasi dan SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Timbal-balik Zonasi dan SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Timbal-balik Zonasi dan SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Timbal-balik Zonasi dan SKPD (Laporan)	18	0	17	100.004.355,00	17	70.000.000,00	17	81.110.774,00	17	120.000.000,00	17	120.000.000,00	17	120.000.000,00	120.000.000,00		(20)
1.06.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaksanaan dan Aspek Program Peningkatan Anggaran																	KAB. KUTNA TIMUR	(21)
Terlaksanya Dokumen Pelaksanaan dan Aspek Program Peningkatan Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Aspek Program Peningkatan Anggaran (Dokumen)	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		(22)
1.06.01.2.03 - Administrasi Pengelolaan Perangai																		(23)
Jumlah AMH di Dinas Sosial	Aspek Paket Program dan Aspek Aspek Kelayakan (Paket)	150	0	1	112.000.000,00	1	832.000.000,00	1	502.000.000,00	1	202.000.000,00	1	302.000.000,00	1	302.000.000,00	302.000.000,00		(24)
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Program Dinas kemaritiman Aspek Kelayakan	Aspek Dokumen Pengadaan dan Pengadaan Aspek Kelayakan (Dokumen)	0	0	5		5		5		5		5		5			KAB. KUTNA TIMUR	(25)
Terlaksanya Peningkatan Dinas kemaritiman Aspek Kelayakan	Jumlah Program Hindaran Tindakan Pengalihan Anggaran yang mengalami Pembekuan dan Pembekuan (Gronel)	100	10	10		74		74		10		10		10				(26)
1.06.01.2.05.0003 - Peningkatan dan Peningkatan Aspek Kelayakan																	KAB. KUTNA TIMUR	(27)
Terlaksanya Pelaksanaan Dinas kemaritiman Aspek Kelayakan (Paket)	Jumlah Paket Program dan Aspek Aspek Kelayakan (Paket)	100	0	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	300.000.000,00		(28)
1.06.01.2.05.0003 - Peningkatan dan Peningkatan Aspek Kelayakan																	KAB. KUTNA TIMUR	(29)

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(03)	(04)	(05)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
MENDUKUKA NYA KEHAKSIKATAN SOSIAL 1.06.04.2.01 - realisasidnd Sesuai Output Peningkatan Keterampilan Pekerja, Anak Terdampak, Lansia Usia Terancam, serta Cakupan Peningkatan di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Sosial (%)	100	9-43	100	2.118.346.362.00	100	2.304.141.010.00	100	2.448.796.716.00	100	2.600.078.184.00	100	2.760.000.000.00	1.06.04.00.0.00.01.00 00 - Diura Subur			
Jumlah Peningkatan Dandndndnd Terdampak / Anak Terdampak, Lansia Usia Terancam, serta Cakupan Peningkatan (Peningkatan di Luar Panti Sosial yang direalisasi)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan dan Peningkatan Dasar Kesehatan	30	20	20	1.070.100.000.00	20	1.782.000.000.00	20	1.846.194.004.00	20	1.962.000.000.00	20	2.118.066.033.00				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Bantuan Kesehatan Kesehatan (Chung)	30	20	20		20		20		20		20					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dari Alat Bantu Pening- katan kesehatan Kesehatan	20	14	20		20	14			14		14					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dulu dan Peningkatan Kesehatan	20	20	20		20				20		20					
	Jumlah orang yang Mendapatkan layanan Peningkatan Sosial dan Peningkatan Sosial bagi Anak dan Lansia dengan Risiko (ABH) Kesehatan Kesehatan (Chung)	0	0	20		20				20		20					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesehatan (Chung)	20	25	25		25				25		25					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan (Chung)	40	60	60		20				60		60					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesehatan (Chung)	100	20	20		20				20		20					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Kesehatan Kesehatan (Chung)	0	0	10		20				20		20					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET				PAGU	PAGU
(01)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pendidikan Kejuruan Pemula dan Sekolah Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120				
	Jumlah Orang yang mendapat Pelatihan Sosial Usaha Mandiri di Kabupaten Kota (Cangk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan dan Keterampilan Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)	72	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan dan Keterampilan Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan dan Keterampilan Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)	0	0	5	5	4	15	20	20	20	20	20	20				
	Jumlah Peserta Pelatihan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Kabupaten Kota (Cangk)	80	50	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
	Jumlah Peserta Pelatihan Sosial seperti Keluarga, Persekolah, Kesehatan, Sosial, Anak, Tabung, Lari, dan lainnya, serta Pelatihan Persekolah dan Masyarakat di Kabupaten Kota (Cangk)	70	25	20	110	80	90	200	200	200	200	200	200				
	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan dan Keterampilan Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)																
	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan dan Keterampilan Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)																
	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan dan Keterampilan Dasar di Kabupaten Kota (Cangk)																
T. 01.04.2.01.0001 - Peningkatan Peningkatan																	
KAB. KUTAI	TIMOR																

[illegible]

[illegible]

[illegible]



4.2. Program Prioritas Dinas Sosial yang Mendukung Program Prioritas Daerah

Rencana Program Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur merupakan Kumpulan program yang disusun mendukung sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang tertuang didalam Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung
Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program “Layanan Jemput Bola” bertujuan menjangkau langsung kelompok masyarakat yang rentan dan sulit mengakses layanan dasar, khususnya dalam bidang pendidikan non-formal, kesehatan gizi (stunting), dan perlindungan sosial bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non-Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Menyediakan layanan perlindungan hukum dan pemberdayaan sosial secara merata bagi kelompok rentan, khususnya anak, perempuan, dan keluarga yang menghadapi berbagai persoalan kekerasan, diskriminasi, krisis rumah tangga, maupun permasalahan hukum.			Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga di Setiap Kecamatan
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program ini mencakup pembangunan rumah baru, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga relokasi terpadu bagi warga	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.000 Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak Longsor



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		terdampak bencana ke lokasi yang lebih aman dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pendekatan pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan mitra swasta/CSR.			

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat. Indikator Kinerja dan IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2. T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TAHUN							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terselenggaranya program pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Sosial}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100\%$	69,84	69,84	54,74	65,69	71,16	85,76	91,24	100
Terwujudnya penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	$\frac{\text{Jumlah warga migran yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh migran yang melapor}} \times 100\%$	65,00	65,00	50	60	70	80	90	100
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100\%$	100	100	9,80	10,78	11,76	12,74	13,72	14,70



Terselenggara nya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat	Cakupan anak – anak terlantar yang yang ditangan)	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang mendapat perlindungan}}{\text{Jumlah seluruh anak terlantar}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan fakir miskin yang mendapatkan kan pelatihan untuk pengembang an usaha	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan pengembangan usaha}}{\text{Jumlah fakir miskin}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	20,00
Terselenggara nya bantuan untuk korban bencana	Prosentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$	100	100	50	60	70	80	90
	Nilai Sakip	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{PK} \times 30\%) + (\text{UK} \times 25\%) + (\text{LK} \times 15\%) + (\text{EK} \times 10\%) + (\text{CK} \times 20\%)$	75,05	76,29	55,00	59,60	75,00	79,50	80,50
Meningkatny a Koordinasi, Efisiensi dan Efektivitas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	IP ASN	$\text{IP ASN} = (\text{Kualifikasi} \times 30\%) + (\text{Kompetensi} \times 30\%) + (\text{Kinerja} \times 40\%)$			81,00	81,05	81,10	81,15	81,20
	Indeks								81,25



Tabel 4.2. T-C 28

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Satuan	Data Awal	Target Tahun						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	33,33	42,67	53,33	63,33	78,40	85,33	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	16,70	23,33	30,43	56,12	60,85	67,61	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	10,53	13,68	15,79	20,53	21,05	25,79	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	12,00	28,00	36,00	44,00	52,00	60,00	
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	16,67	23,33	30,00	36,67	43,33	50,00	
6	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	0	55,53	2,28	2,93	3,59	4,24	4,89	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Rensta) Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Sosial

Rencana Strategis Renstra ini berfungsi sebagai landasan akuntabilitas kinerja dan panduan bagi Upaya berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di kabupaten Kutai Timur. Keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Dinas Sosial serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan diharapkan terus menjadi instrument efektif dalam Upaya mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, mandiri, adil dan bebas dari kemiskinan dimasa yang akan datang



Pada Tanggal : 29 September 2025
Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197208052001121007